

Temuan BPK hanya Administrasi

PONTIANAK - Ada lima komponen temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010. Semuanya berkaitan dengan administrasi. Salah satunya



Sutarmidji

adalah penyerahan aset kepada PDAM yang dianggap sebagai penyerahan modal sebesar Rp29 miliar.

"Aset pemkot bidang air bersih diserahkan kepada PDAM. Bentuknya dianggap se-

bagai penyertaan modal. BPK menanggapi harus ada perda," ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sesuai paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa (7/6).

Tetapi, pemkot menganggap tidak perlu ada perda baru, karena sudah tertuang dalam

• ke halaman 15 kolom 5

Temuan BPK hanya Administrasi

Sambungan dari halaman 9

anggaran pendapatan dan belanja daerah. "APBD sudah diperdakan sehingga tidak perlu perda baru. Ternyata kita benar. Berdasarkan konsultasi Kemendagri, aturan yang mengharuskan penyerataan modal dengan perda sudah dicabut sejak 2009," ungkap Sutarmidji.

Temuan lainnya adalah keterlambatan distribusi buku bidang pendidikan. Keterlambatan ini disebabkan aturan, yakni dana alokasi khusus turun pada akhir tahun. Sutarmidji yakin jika aturan mengharuskan DAK turun awal tahun, keterlambatan tidak akan terjadi.

Akibat keterlambatan ini,

tidak ada kerugian negara. Tetapi tiga perusahaan yang melakukan distribusi dikenakan denda. Total denda dari tiga perusahaan tersebut sebesar Rp200 juta.

"Mereka sudah membayar semuanya. Memang aturan ada pengenaan denda, agar ada efek jera," kata bapak tiga anak ini.

Opini yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010 adalah wajar dengan pengecualian. Menurut Sutarmidji, secara keseluruhan raperda tentang LKPJ Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010, pendapatan ditargetkan sebesar Rp801,51 miliar dan

terrealisasi 95,53 persen atau sebesar Rp765,7 miliar. Belanja ditargetkan sebesar Rp826,25 miliar dan terealisasi Rp752,86 miliar atau 91,12 persen. Sedangkan pembiayaan netto ditargetkan Rp24,74 miliar, terealisasi 89,73 persen atau Rp22,2 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Arif Joni Prasetyo berharap pada hasil pemeriksaan BPK 2011 bisa mendapat wajar tanpa pengecualian. "Ini merupakan tolak ukur perbaikan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Capaian yang ada lebih baik dari sebelumnya. Realisasi belanja sudah memenuhi target. Rata-rata 90 persen. Untuk lebih jauh, akan didalami," ungkap Arif. (uni)